# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Literatur Review

 Untuk menganalisis bagaimana Efektivitas Kerjasama *Sister City* Bandung-Hamamatsu Dalam Program Pelatihan Pencegahan Kebocoran Air Di Kota Bandung, penulis mencoba untuk mengumpulkan beberapa informasi dari penelitian sebelumnya yang masih relevan untuk mendukung penelitian ini. Ada beberapa literatur review yang akan membantu penulis dalam penulisan ini, karena dalam sebuah karya tulis ilmiah terutama skripsi ini tidak ada yang bersifat asli yang benar-benar baru dihasilkan oleh penulis.

 Literatur pertama merupakan jurnal yang judul ***“Efektivitas Pelayanan Dalam Pendistribusian Air Di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Intan Banjar Kota Banjarbaru***”. Dalam penelitan tersebut, ada lima indikator yang digunakan dalam mengukur efektivitas pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Intan Banjar menurut Lovelock (2005), diantaranya yaitu Indikator Tangible (Berwujud), Indikator Reliable (Handal), Indikator Responsiveness (Respon atau Ketanggapan), Indikator Assurance (Jaminan) dan Indikator Emphaty. Dengan melihat indikator tersebut, penelitian yang dilakukan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Intan Banjar ini bahwa efektivitas pelayanan dalam pendistribusian air ini dinilai sudah cukup baik. Hal tersebut tidak hanya bisa terlihat dari indikator yang mempengaruhi, tetapi juga dapat dilihat dari usaha memaksimalkan sarana dan prasarana yang disediakan untuk kenyamanan pelanggan, kemampuan pegawai yang masih belum efektif atau belum maksimal ini bisa disebabkan oleh pengaruh letak geografis pelanggan yang berada di dataran tinggi yang menyebabkan pendistribusian air ke pelanggan ini tidak merata, Adanya keluhan mengenai kebocoran pipa dan pendistribusian air yang kurang lancar dan keruh masih belum sesuai dengan standar perusahaan serta pentingnya komunikasi antara pegawai dan pelanggan untuk meminimalisir adanya hambatan dalam berinteraksi sehari-hari (Devitasari, 2019).

 Kedua, jurnal berjudul ***“Kerjasama Green Sister City Surabaya dan Kitakyushu (Studi Kasus Pengelolaan Sampah) Melalui Super Depo Suterejo”***, membahas mengenai kerjasama dibidang lingkungan antar pemerintah kota dengan pemerintah kota di negara asing, dalam kasus ini yaitu Surabaya dan Kitakyushu mengenai pengelohan limbah menggunakan teknologi limbah organik dan limbah anorganik secara modern yang berbasis ramah lingkungan dan proses pemilahan sampahnya pun bisa dilakukan lebih efektif, efisien dan juga higienis serta Surabaya menjadi kota yang pertama yang mencontoh manajemen pengelolaan lingkungan Kitakyushu yang hasilnya menjadi *low carbon city*.Super Depo Suterejo ini berpengaruh terhadap tiga aspek, diantaranya dari segi lingkungan, ekonomi dan sosial. Dengan adanya kerjasama ini, Surabaya menjadi salah satu kota di Indonesia yang dapat mengelola sampah dengan baik melalui program 3R yaitu *reduce, reuse* dan *recycle* yang menjadikan tujuan Surabaya sebagai *green city*. Faktor adanya dukungan dari beberapa pihak yang telibat, kesadaran warga yang cukup tinggi serta penyediaan sarana dan prasana oleh pemerintah kota juga dapat mempengaruhi keberhasilan kerjasama yang dibangun oleh antar kedua kota ini (Bonieta Octavia, 2017).

 Ketiga, jurnal yang berjudul ***“Paradiplomacy Pemerintah Kota Bandung Melalui Kerja Sama Sister City”*** membahas mengengai peranan *sister city* yang secara tidak langsung dapat membantu Indonesia dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya melalui diplomasi, khususnya dalam kasus ini yaitu melalui paradiplomasi. Hubungan *sister city* yang setara antar kedua kota akan menjadikan hubungan yang dibangun ini menjadi harmonis dan saling menguntungkan. Ada juga pola *Buttom Up* dan *Top Down* serta gabungan keduanya akan menjadi pola ideal dalam mewujudkan proses *sister city,* karena pada dasarnya *sister city* ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan Kota Bandung saja, akan tetapi untuk memenuhi dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat Kota Bandung itu sendiri (Alam & Sudirman, 2020).

## 2.2 Kerangka Teoritis/Konseptual

### 2.2.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional merupakan interaksi yang dilakukan oleh warga negara baik dilakukan oleh aktor pemerintah maupun individu. Didalam ranah hubungan internasional ini bisa membahas mengenai semua hal yang menjadi ranah internasional termasuk juga uugangan internasional, pertukaran budaya, komunikasi, pariwisata serta perkembangan nilai-nilai dan etika internasional.

 Menurut **Anak Agung Banya Perwita**dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Hubungan Inteernasional”, mengartikan hubungan internasional sebagai berikut:

**“Hubungan internasional dapat diartikan sebagai studi yang membahas interaksi antar berbagai aktor yang ikut dalam partisipasi politik internasional baik itu negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, kesatuan sub-nasional semacam birokrasi serta pemerintah domestik dan individu-individu. Tujuan yang mendasar yaitu untuk mempelajari lebih rinci mengenai perilaku internasional (negara ataupun non-negara). Perilaku tersebut dapat membentuk sebuah kerjasama, membentuk aliansi, perang, konflik maupun interaksi dalam organisasi internasional.”** (Yanyan &, 2014)

Dalam hubungan internasional itu tidak hanya membahas mengenai satu apek saja, tetapi bisa membahas dan mencangkup seluruh aspek dengan melalui interaksi yang dibangun baik itu membahas mengenai politik, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, keamanan nasional, lingkungan hingga pariwisata dan pertukaran budaya. Selain itu, aktor yang dapat berperan dan mempengaruhi dalam hubungan internasional sangat luas dari individu, kelompok, organisasi hingga negara itu sendiri. Dengan begitu, Pemerintah Kota Bandung berhak untuk melakukan kerjasama luar negeri, dalam hal ini Pemerintah Kota Bandung mewujudkan dengan adanya pembetukan hubungan kemitraan dengan pemerintah daerah di negara lain atau yang sering disebut dengan hubungan *sister city*.

### 2.2.2 Teori Kerja Sama Internasional

Pasca perang dingin, ada banyak negara yang berpartisipasi dalam hubungan internasional, terutama dengan cara melalu kerjasama internasional dan hubungan internasional ini menjadi semakin kompleks. Dalam rangka guna mencapai kepentingan, manusia pasti akan melakukan usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri dan tidak bisa lepas dari bantuan orang lain. Oleh karena itu, manusia perlu melakukan kerjasama guna mencapai dan memenuhi kebutuhan serta tujuan yang akan dicapai. Kerjasama merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh antar individu, antar kelompok maupun individu dengan kelompok guna mencapai tujuan bersama. Saat ini yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Kota Hamamatsu termasuk dalam kerjasama internasional. Kerjasama internasional adalah salah satu bagian dari interaksi yang dibangun oleh aktor internasional, ini juga dapat diartiikan sebagai hubungan yang terjadi dengan tidak adanya keterpaksaan dan bersifat legal (Dougherty,1997).

 Kerjasama Internasional menurut **K. J. Holsti**, dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. **Pandangan dua kepentingan atau lebih,pandangan tentang tujuan yang saling memuaskan, yang dapat menghasikan sesuatu yang kemudian dipromosikann atau diwujudkan oleh semua pihak.**
2. **Pandangan atau harapan tentang bentuk kebijakan yang dikembangkan bersama oleh suatu negara dan negara lain yang akan membantu negara tersebut dalam mewujudkan nilai-nilainya.**
3. **Kesepakatan atau masalah tertentu yang tercapai ketika dua atau lebih negara mengambil keuntungan dari kepentingan bersama atau konflik kepentingan.**
4. **Negara bernegosiasi dengan aturan formal atau informal untuk bekerjasama mencapai kesepakatan bersama.** (Obsatar Sinaga, 2010)

### 2.2.3 Konsep Paradiplomasi

Paradiplomasi merupakan fenomena yang baru didalam dunia hubungan internasional yang berdasar kepada kapasitas kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh aktor sub-nasional. Disini pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola kepentingan daerahnya masing-masing dalam cangkupan skala internasional. Sama halnya dengan kerjasama yang dilakukan dan dibangun oleh Pemerintah Bandung dengan Pemerintah Hamamatsu ini termasuk kedalam paradiplomasi dikarenakan aktor yang berperan disini yaitu aktor sub-nasional dari kedua negara yang berbeda.

 Dampak dari adanya globalisasi yang merubah kegiatan diplomasi dan merubah aktor diplomatik yang menjadikan aktor non-negara menjadi bagian dalam aktor subnasional menjadikan pertukaran dan kerjasama yang dibangun oleh negara antar dunia ini menjadi semakin luas. Kegiatan atau interkasi yang dibangun oleh *sub-state actor* didalam hubungan internasional biasanya disebut paradiplomasi. Paradiplomasi merupakan aktivitas yang dilakukan yang berdasar pada kemampuan aktor subnasional dalam melakukan hubungan diplomatiknya dengan negara lain untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya (Mukti, 2013).

 Ada empat pola yang dapat mendukung aktivitas paradiplomasi dalam melaksanakan diplomasi internasional menurut **Ivo D. Dunchacek**, yaitu :

**“*Transborder paradiplomacy, transregional paradiplomacy, global diplomacy and paradiplomacy.”*** (Duchacek, 1990)

 Dalam penerapan konsep paradiplomasi, Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Kota Hamamatsu mengimplementasikan dengan menjalin hubungan kerjasama. Kerjasama *sister city* yang dibangun oleh Pemerinah Kota Bandung dan Pemerintah Kota Hamamatsu ini bisa dikatakan sebagai salah satu *global diplomacy* karena aktor yang berperan yaitu aktor sub-nasional yang berinteraksi dan melakukan diplomasi dalam bentuk paradiplomasi. Dengan paradiplomasi ini, Kota Bandung dan Kota Hamamatsu ini bisa meningkatkan dan mengembangkan kotanya dalam bidang tertentu yang akan direncanakan untuk kerjasama bidang tertentu. Kota Bandung dengan otonomi daerahnya yang diberi kewenangan untuk mengelola daerahnya secara mandiri ini menjadi kewajiban pemerintah daerah tersebut untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi yang dimiliki oleh daerahnya tersebut.

### 2.2.4 Konsep *Sister City*

 *Sister City*merupakan kerjasama yang dibangun dan disepakati secara resmi oleh kedua pihak yang umumnya dilakukan oleh dua negara yang memiliki kesamaan didalam kotanya dalam hal demografi ataupun persamaan dalam permasalahan yang dihadapi oleh kedua kota tersebut. Tujuan *sister city* diantaranya guna mendukung kegiatan masyarakat dan untuk membentuk pemerintahan yang lebih baik. Dengan itu *sister city* bisa bermanfaat dalam adanya program pertukaran sumber daya manusia serta kerjasama dalam menghadapi permasalahan yang ada baik disegala bidang yang disepakati untuk adanya program kerjasama, sehingga bisa membuat pemerintahan di kedua kota tersebut menjadi lebih baik tergantung dari kerjasama yang akan dilakukan dan hal tersebut juga bisa dikatakan sebagai rasa dukungan terhadap masyarakat dalam membangun dan mengembangkan kota tersebut.

 Dalam Buku Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional **Sidik Jatmika**, mengatakan:

**“Hubungan Kerjasama yang dibangun antara dua kota bisa dilakukan oleh antara pemerintah wilayah, kota maupun kota administratif yang berada diatas tingkat pemerintah daerah negara. Dalam kemitraan yang bermasalah harus juga dilengkapi dengan membuat rencana baik itu kegiatan tetap maupun kegiatan terencana yang melibatkan kerjasama, tujuan yang hendak dicapai, dan kontribusi biaya semua pihak serta waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan bersama yang direncanakan .”** (Jatmika, 2001)

### 2.2.5 Konsep Paradiplomasi Bandung-Hamamatsu

 Dalam penerapan konsep paradiplomasi, Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Kota Hamamatsu mengimplementasikan dengan menjalin hubungan kerjasama. Kerjasama *sister city* yang dibangun oleh Pemerinah Kota Bandung dan Pemerintah Kota Hamamatsu ini bisa dikatakan sebagai salah satu global diplomacy karena aktor yang berperan yaitu aktor sub-nasional yang berinteraksi dan melakukan diplomasi dalam bentuk paradiplomasi. Dengan paradiplomasi ini, Kota Bandung dan Kota Hamamatsu ini bisa meningkatkan dan mengembangkan infrastrukur dari kedua kota tersebut dalam bidang tertentu yang akan direncanakan untuk kerjasama bidang tertentu. Kota Bandung dengan otonomi daerahnya yang diberi kewenangan untuk mengelola daerahnya secara mandiri ini menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah daerah tersebut untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi yang dimiliki oleh daerahnya tersebut. Di Indonesia sendiri, wewenang yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah telah diatur dalam Undang-Undang.

 Kewenangan tersebut tertera dalam Pasal 1 ayat 5 UU Nomor 32 Tahun 2004, yang berbunyi:

**“Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerirntahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan pertaturan perundang-undangan.”** (Pemerintah Indonesia, 2004)

### 2.2.6 Konsep *Sister City* Bandung-Hamamatsu

 Kota Bandung dan Kota Hamamatsu memiliki kesamaan dalam letak geografis dan insfrastruktur, selain itu permasalahan yang dihadapi pun hampir sama salah satunya dalam bidang lingkungan. Oleh karena itu Kota Bandung dan Kota Hamamatsu memutuskan untuk menjalin kerja sama *sister city* dalam bidang lingkungan mengenai bagaimana cara mengatur air bersih.

 Jika berdasarkan konsep diatas, kerjasama *sister city* dapat berjalan jika kedua pihak memiliki administrasi yang sama. Selain itu, kedua pihak harus memiliki tujuan dan misi yang jelas untuk membangun kawasan daerah. Kerjasama yang dibangun oleh Bandung dan Hamamatsu ini memiliki kesamaan administrasi yaitu kerjasama di tingkat kota. Kerjasama antar kota ini juga memiliki tujuan dan misi yang jelas yaitu untuk membangun dan meningkatkan kerjasama di bidang lingkungan. Kerjasama antar kota ini juga dapat terlaksana karena sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama sebagai landasan maupun panduan dalam melakukan kegiatan hubungan kerjasama *sister city* ini. Hal ini sesuai dengan landasan *Letter of Intent (LoI)* Bandung Hamamatsu dalam bidang kebudayaan dan lingkungan hidup akan terciptanya kerjasama dan hubungan yang harmonis di antara masyarakat kedua kota. Kerjasama yang telah disepakati antara Bandung dan Hamamatsu dalam bidang kebudayaan dan lingkungan hidup juga tertera dalam *Memorandum of Understanding (MoU)*.

## 2.2.7 Konsep Kerjasama Bandung-Hamamatsu Dalam Program Pencegahan Air

 Pertumbuhan penduduk Kota Bandung yang cukup pesat, saat ini dan peningkatan kegiatan ekonomi dimasa mendatang, sumber daya air telah menjadi salah satu kekayaan yang sangat penting. Air merupakan kebutuhan pokok untuk konsumsi dan sanitasi masyarakat, untuk produksi berbagai barang serta untuk produksi lainnya. Air juga merupakan sarana pengangkutan yang penting dan menjadi faktor penting dalam sistem penyediaan air minum. Potensi dan perlindungan air baku ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan perencanaan yang didasarkan keahlian serta pengelolaan yang seksama merupakan hal yang penting untuk mencapai tingkat efisiensi pemanfaatan air yang akan dibutuhkan dimasa yang akan mendatang. Infestasi dalam perkembangan sumber daya air, dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomi, sosial dan politis serta kenyataan-kenyataan teknik dasar. Dalam perngembangan penyediaan air minum, air baku menjadi faktor yang sangat penting. Karena tanpa ketersediaan air baku yang cukup secara kuantitas dan memenuhi dari segi kualitas tidak dapat dilaksanakan perencanaan sistem pelayanan air minum pada masa yang akan datang. Sebagai salah satu bentuk perpanjangan tangan Pemerintah Daerah Kota Bandung yang bergerak dalam bidang pelayanan umum khususnya bidang pelayanan air minum dan pengelolaan air limbah, Perumda Tirtawening Kota Bandung dituntut untuk dapat melayani kebutuhan air minum dan pembuangan air limbah bagi seluruh masyarakat serta aktivitas Kota Bandung. Hal ini bertujuan menciptakan suatu kondisi sanitasi lingkungan yang memadai, yang pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah , Pasal 1 ayat 4 yang berbunyi:

 **“Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangundangan”.**

Pemerintah Daerah Kota Bandung denga Kota Hamamatsu yang memiliki hubungan erat kerjasama salah satunya dengan pelatihan personil dalam bidang sistem penyediaan air,pelatihan personil bidang lingkungan dan juga sanitasi ini dapat mendorong kolaborasi antara institusi akademik budaya dan penelitian. Kerjasama yang mulanya pada tahun 2014, pada tahun 2017 disepakati untuk melakukan program kerjasama dalam pencegahan kebocoran air di Kota Bandung yang dimana kegiatan ini sangat bermanfaat sekali khususnya bagi Kota Bandung. Hasil dari kegiatan yang dilakukan pun selalu dilakukannya diskusi dan evalusi sebagai bentuk pengawasan atas penyelenggaraan program yang dilakukan untuk dijadikan masukan ataupun evaluasi jika adanya program selanjutnya yang akan dilaksanakan.

## 2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pemaparan uraian di atas serta asumsi yang dikemukakan, maka penulis akan merumuskan hipotesis sebagai berikut: “**Kerjasama *Sister City* Bandung-Hamamatsu Dalam Program Pelatihan Pencegahan Kebocoran Air di Kota Bandung akan meminimalisir permasalahan lingkungan hidup khususnya dalam kebocoran air di Kota Bandung”**

## 2.4 Verifikasi Variabel dan Indikator

Tabel 1.1 Operasional Variabel dan Indikator

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Indikator** | **Verifikasi (Analisis)** |
| **Variabel Bebas :**Kerjasama *Sister City* Bandung-Hamamatsu Dalam Program Pelatihan Pencegahan Kebocoran Air di Kota Bandung berjalan dengan efektif**Variabel Terikat :**Akan meminimalisir permasalahan lingkungan hidup khususnya dalam kebocoran air di Kota Bandung | 1. Adanya Kerjasama yang bersifat berkelanjutan dan keterkaitan antara Bandung dan Hamamatsu dalam program kerjasama di bidang lingkungan hidup
2. Adanya solusi untuk menangani kebocoran air di Kota Bandung yang menggunakan teknologi modern yang dapat mendeteksi kebocoran air
3. Adanya pelatihan ketempilan untuk menyeimbangi dan melengkapi program pelatihan kebocoran air di Kota Bandung
 | 1. Memorandum antara pemerintah Bandung dan Hamamatsu dalam rangka kerjasama bidang lingkungan hidup, Bandung 7 September 2018. (<http://kerjasama.bandung.go.id/2018/09/08/kerja-sama-lingkungan-hidup-bandung-dengan-hamamatsu>)
2. Pertemuan antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kota Hamamtsu mengenai pelaksanaan kerjasama di bidang lingkungan hidup.
3. Fakta data tentang kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dengan pemerintah kota di luar negeri terutama dengan Pemerintah Kota Hamamatsu. (<http://kerjasama.bandung.go.id/dokumentasi/rekapitulasi/data-kerjasama-kota-bandung-dengan-pihak-luar-negeri-tahun-2017>)
4. Solusi untuk mengatasi kebocoran air di Kota Bandung. *(*[*https://www.ayobandung.com/bandung/amp/pr-79656883/cegah-kebocoran-air-jepang-hibahkan-alat-pendeteksi-kepada-pemkot-bandung?page=2*](https://www.ayobandung.com/bandung/amp/pr-79656883/cegah-kebocoran-air-jepang-hibahkan-alat-pendeteksi-kepada-pemkot-bandung?page=2)*)*
5. Adanya pengiriminan pegawai Perumda Tirtawening Kota Bandung ke Hamamatsu dalam program pelatihan kebocoran air di Bandung.

([*https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4294688/pegawai-pdam-bandung-belajar-pengelolaan-air-ke-jepang*](https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4294688/pegawai-pdam-bandung-belajar-pengelolaan-air-ke-jepang)*)* |

## 2.5 Skema dan Alur Penelitian

Kerjasama *sister city* Program Pelatihan Pencegahan Kebocoran Air Di Kota Bandung

Pemerintah Bandung

Pemerintah Hamamatsu

Meminimalisir permasalahan lingkungan hidup khususnya dalam kebocoran air di Kota Bandung

- Pertukaran dan Pelatihan stakeholder yang berkaitan dengan lingkungan hidup

- Hibah alat pendeteksi kebocoran air berupa *Lear Locating Correlator* dan *Acoustic Lear Detector*